

Euforia Imlek hingga Tiket Politik

Oleh: Hendra Kurniawan

SEJAK Gus Dur menjadi Presiden RI keempat, katup penyumbat kebebasan warga Tionghoa terbuka. Paling tidak ada dua kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Gus Dur terkait dengan keberadaan Tionghoa di Indonesia. *Pertama*, Keppres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967. Dalam inpres yang dikeluarkan oleh penguasa Orde Baru ini dinyatakan bahwa segala wujud budaya dan tradisi Tionghoa seperti Tahun Baru Imlek, pertunjukan wayang potehi, barongsai, dan sebagainya hanya boleh dirayakan di kalangan keluarga di dalam rumah atau kelenteng.

Kedua, Gus Dur juga mengumumkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Tidak lama kemudian Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, sebagaimana hari raya agama-agama lainnya melalui Keppres No. 19 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa Reformasi ini pula Konghucu diakui sebagai agama keenam di Indonesia sehingga kebebasan bagi para pemeluknya untuk beribadah lebih terjamin.

Kebijakan Gus Dur ini sangat bertolak belakang dengan perlakuan diskriminatif yang diterapkan oleh rezim Orde Baru. Saat ini hingar-bingar dan gegap-gembita perayaan Tahun Baru Imlek sangat terasa. Bahkan menariknya setelah Tahun Baru Imlek resmi dinyatakan sebagai hari libur nasional, banyak warga bukan Tionghoa ikut pula menikmati kemeriannya. Tentu suasana ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan masa Orde Baru.

Melalui kebijakan diskriminatif dan asimilasi yang dipaksakan, Orde Baru telah menjerumuskan masyarakat Tionghoa menjadi *economic animal* yang memiliki sifat apolitis dan asosial. Masyarakat Tionghoa merasa sebagai *outsider* yang pada akhirnya semakin menutup diri dan cenderung memosisikan dirinya secara eksklusif dalam masyarakat. Sikap apolitis dan asosial ini akhirnya menjadi turun-temurun dan selalu muncul perasaan curiga dalam diri warga Tionghoa sendiri bahwa dirinya akan selalu mendapat perlakuan diskriminatif dari orang lain. Maka generasi baru Tionghoa ke-

banyakan lebih memilih profesi yang menurut mereka "aman" dan "sesuai jatah" seperti pedagang, pengusaha, pegawai bank, pemborong, dan sejenisnya. Mereka tidak melihat pekerjaan sebagai guru, PNS, pejabat pemerintahan, polri, maupun militer.

Partisipasi politik

Sejak zaman kejayaan Nusantara, masyarakat Tionghoa telah turut mewarnai kehidupan bernegara saat itu. Tionghoa merupakan bagian dari entitas kebangsaan Indonesia seperti halnya suku bangsa lainnya. Di era reformasi sekarang ini, dengan hak dan kewajiban yang sama, warga Tionghoa mulai berani terjun ke berbagai bidang termasuk politik. Keterbukaan dan penerimaan masyarakat terhadap hal ini menunjukkan kedewasaan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Thung Ju Lan (2010) mengemukakan bahwa setelah Peristiwa 1998 bermunculan berbagai perkumpulan masyarakat Tionghoa, seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI). Belum lagi perkumpulan sejenis yang sifatnya lokal. Pada ranah politik juga muncul beberapa partai Tionghoa yaitu Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembauran Indonesia (Parpindo), dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI) yang berhasil menjadi partai peserta Pemilu 1999.

Partisipasi warga Tionghoa dalam kehidupan bernegara makin dipertegas. Pada masa pemerintahan SBY lahir UU Kewarganegaraan Indonesia yang baru No. 12 Tahun 2006. UU ini menempatkan warga Tionghoa dalam persamaan dan kesetaraan dengan warga negara lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu hubungan warga Tionghoa dengan warga Indonesia lainnya juga lebih terbuka. Budaya Tionghoa seperti Pertunjukan Barongsai, Wayang Potehi, perayaan Imlek, Cap Go Meh, dan budaya Tionghoa lainnya saat ini telah diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas.

Penerimaan yang baik ini dibaca oleh masyarakat Tionghoa sebagai kesempatan untuk terlibat pula

dalam politik praktis. Dalam panggung politik nasional sejak tahun 2000-an bermunculan nama seperti Kwik Kian Gie, Tjandra Wijaya Wong, Murdaya Po, Daniel Budi Setiawan, Rudianto Tjen, Alvin Lie, Enggartiasto Lukita, dan lainnya. Dalam kabinet beberapa nama juga sempat menduduki jabatan sebagai menteri seperti Kwik Kian Gie dan Marie Elka Pangestu sekarang ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sejak Pemilu 2004 hingga menjelang Pemilu 2014 ini tidak satu pun partai Tionghoa yang berhasil lolos sebagai peserta pemilu. Meskipun demikian sejumlah calon legislatif Tionghoa tersebar dalam berbagai partai politik. Beberapa pengamat menilai bahwa keikutsertaan Tionghoa dalam pemilu cenderung sekedar untuk menarik pemilih (*vote getter*) dan sebagai pendukung dana kampanye partai. Akan tetapi apapun itu kehadiran warga Tionghoa dalam politik praktis menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam partisipasi politik Tionghoa, mereka tidak memikirkan keselamatan diri mereka sendiri tetapi juga peduli pada nasib bangsa dan negara. Hal ini juga menunjukkan pembauran yang alami bahwa dalam alam demokrasi upaya warga Tionghoa untuk berpolitik tidak bersifat eksklusif melalui suatu partai bercirikan Tionghoa namun terintegrasi dalam partai-partai politik yang sudah ada.

Di tingkat politik lokal juga muncul tokoh-tokoh Tionghoa yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Paling fenomenal tentu saja Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM alias Tjung Ban Hok (Ahok) yang pernah duduk sebagai Bupati Belitung Timur, anggota DPR RI, dan sekarang ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Adiknya, Basuri Tjahaja Purnama, juga berhasil menjadi Bupati Belitung Timur. Di Kalimantan Barat terpilih pula Christiandy Sanjaya (Bong Hou San) sebagai wakil gubernur dan Hasan Karman (Bong Sau Fan) sebagai walikota Singkawang.

Jika pada tingkat lokal sudah terbukti bahwa calon dari warga

Tionghoa bisa berjaya memenangkan pemilu. Maka di tingkat nasional, pencalonan Wiranto-Hari Tanoesoedibjo sebagai presiden dan wakil presiden merupakan hal baru. Majunya Hary Tanoesoedibjo, seorang Tionghoa bermarga Tan, sebagai wakil presiden dapat menjadi suatu *test case* politik pertama bagi partisipasi politik Tionghoa pada tingkat nasional.

Kontribusi menarik

Populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia memang tidak banyak. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa demokrasi bukanlah monopoli mayoritas. Partisipasi politik kaum minoritas yang dilakukan secara demokratis justru memberikan kontribusi yang menarik dan memberi warna dalam proses demokratisasi itu sendiri. Meskipun tentu saja tidak mudah dan banyak tantangan bagi warga Tionghoa yang hendak terjun ke dunia politik. Keberadaan kader politik Tionghoa di tengah masyarakat tentu membuat mereka tidak hanya dipilih untuk mewakili kelompoknya namun harus mampu menyerap aspirasi masyarakat lintas etnis.

Keterlibatan secara aktif dalam politik praktis bagi warga Tionghoa bukan sekedar untuk menunjukkan eksistensi, namun juga luapan kebebasan setelah sekian lama potensi dan kemampuan mereka tidak teraktualisasikan. Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tidak melakukan praktik-praktik diskriminasi terhadap etnis maupun kelompok apa pun. Kemajemukan di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Keanekaragaman agama, suku, dan budaya hendaknya dipahami sebagai kekayaan bangsa. Maka memberi tempat bagi berkembangnya tiap-tiap agama, suku, dan budaya merupakan wujud kesadaran untuk "menjadi Indonesia" sesungguhnya yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Akhirnya saya ucapkan: Selamat Tahun Baru Imlek 2565! *Xin Nian Kuai Le, Wan Shi Ru Yi, Xen Ti Jian Kang, Gong Xi Fa Cai!* ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.